Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 7 Tahun Berturut-Turut (2013-2019) Kota Prabumulih oleh BPK RI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

Vinny Oxtafianica
NIM. 07011281621186

Konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
Juli 2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) 7 TAHUN BERTURUT-TURUT (2013-2019) KOTA PRABUMULIH OLEH BPK RI

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

VINNY OXTAFIANICA

07011281621186

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Februari 2021

Pembimbing I

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si.

196311061990031000

Pembimbing II

Dwi Mirani. S.IP., M. Si.

198106082008122002

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 7 Tahun Berturut-Turut (2013-2019) Kota Prabumulih oleh BPK RI"* telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 08 April 2021.

Indralaya, 15 April 2021

Ketua

1. Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.
   NIP. 196311061990031001 .....

Anggota

2. Dwi Mirani, S.IP., M.Si.
   NIP. 198106082008122002 .....

3. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM.
   NIP. 195811191985031003 .....

4. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si.
   NIP. 196511171990031004 .....

Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung,S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

"SUKSES *FII DUNYA WAL AKHIRAH*"

"Sukses bukan tentang siapa yang memulai duluan, tetapi tentang seberapa besar tekad dan usaha kita untuk mencapai kesuksesan tersebut"

Dengan Ridho Allah SWT., skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, ibu Siti Nurjanah dan bapak Andri
2. Kedua adik perempuan saya, Dinda Desvyandjani dan Farisya Alya Nabila
3. Teman-teman saya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2016
4. Kakak-kakak serta adik-adik di Universitas Sriwijaya
5. Seluruh birokrat dan pegawai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya selama proses perkuliahan
7. Almamater Universitas Sriwijaya yang saya banggakan

ABSTRACT

This research was motivated by the Prabumulih City Government's success to achieve the highest audit opinion of WTP for seven consecutive years, which is consistent with the leadership position of Mr. Ir Ridho Yahya since the Mayor of Prabumulih. This research aims to explain and describe the factors that influence WTP opinion results in seven consecutive years (2013-2019) Prabumulih City by BPK RI. This research uses the concept of agency theory by Jensen and Meckling, which defines agency theory as the relationship between agent *(management of a business) and* principal *(business owner), which is then further regulated in Law Number 15 of 2004 to determine the factors that affect the results of audit opinions provided by BPK. The method in this research is the qualitative method. The data collection techniques used are observation, interview, and documentation. The result of this research is that four factors influence the opinion results of WTP Prabumulih City for seven seven consecutive years, namely: The presentation process of LKPD has been following SAP, Information and data presented in LKPD by the facts, The performance of BPKAD and SKPD employees has been based on SOP, and the existence of solid direction and motivation from the leader (mayor). The acquisition of the WTP opinion certainly impacts the Prabumulih City Government, among others: getting an additional budget or Regional Incentive Fund (DID) and can increase the public's confidence in the performance of the local government in Prabumulih City.*

Keywords: Factors, Unqualified Opinion, Supreme Audit Agency (BPK)

Advisor I

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si.
NIP. 196311061990031000

Advisor II

Dwi Mirani, S.IP., M.Si.
NIP. 198106082008122002

Indralaya, April 2021
Chairman of The Public Administration Department
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA
NIP. 198108272009121002

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesuksesan Pemerintah Kota Prabumulih mendapatkan opini audit tertinggi WTP selama 7 tahun berturut-turut, dan hal ini sejalan dengan dimulainya masa kepemimpinan Bapak Ir. Ridho Yahya, MM. sebagai Walikota Prabumulih hingga sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil opini WTP 7 tahun berturut-turut (2013-2019) Kota Prabumulih oleh BPK RI. Penelitian ini menggunakan konsep teori keagenan oleh Jensen dan Meckling yang mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan *agent* (manajemen suatu usaha) dan *principal* (pemilik usaha) yang kemudian lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil opini audit yang diberikan oleh BPK. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ialah terdapat 4 faktor yang mempengaruhi hasil opini WTP Kota Prabumulih selama 7 tahun berturut-turut, yakni: Proses penyajian LKPD telah sesuai SAP, Informasi dan data yang disajikan dalam LKPD sesuai dengan fakta, Kinerja aparat BPKAD dan SKPD telah berdasarkan tupoksi dan SOP yang berlaku, serta adanya arahan dan motivasi yang kuat dari pemimpin (walikota). Dari perolehan opini WTP tersebut, tentunya berdampak bagi Pemerintah Kota Prabumulih, antara lain: mendapat anggaran tambahan atau Dana Insentif Daerah (DID), dan dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan daerah Kota Prabumulih.

Kata Kunci: Faktor-Faktor, Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pembimbing I

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si.
NIP. 196311061990031000

Pembimbing II

Dwi Mirani, S.IP., M.Si.
NIP. 198106082008122002

Indralaya, April 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 7 Tahun Berturut-Turut (2013-2019) Kota Prabumulih oleh BPK RI** ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata-1 Ilmu Administrasi Publik dengan baik. Sholawat beserta salam selalu penulis sampaikan kepada nabi besar kita, Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang oleh cahaya ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan bahwa segala sesuatu yang telah dicapai oleh penulis pada titik ini, bukanlah semata karena usaha dari penulis, melainkan semata-mata karena karunia dari Allah Ta'ala dan doa yang senantiasa dilangitkan oleh kedua orang tua. Untuk itu, skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orangtua tercinta, yakni Bapak Andri dan Ibu Siti Nurjanah. Terima kasih telah mencurahkan segenap kasih sayang, cinta yang tidak tergantikan, motivasi yang dan doa-doanya yang tiada henti hingaa saat ini. Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan juga selaku Dosen Pembimbing I.
3. Bapak Prof Alfitri, M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si.selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

8. Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya, mendengarkan, memberikan saran dan nasehat yang sangat berguna dalam proses menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Dra. Retno Susilowati, MM. Selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti yang telah banyak membantu dalam proses akademik penulis.
10. Seluruh Dosen, Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya telah banyak memberikan ilmu, bantuan, dan pengarahan selama masa perkuliahan.
11. Seluruh teman-teman di Jurusan Administrasi Publik Angkatan 2016, Badan Otonom WAKI FISIP UNSRI, Badan Otonom COGITO FISIP UNSRI, Alumni Man Insan Cendekia Jambi Region Sumatera Selatan, dan terkhusus untuk Galuh, Dimas, Kiki, Nila, Togi, Maulana, Ihsan, Meisi, Apsas, Ajkiya, Masna, Arafik dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang membuat penulis terus termotivasi dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan agar penulis dapat memperbaiki kesalahan dalam usulan penelitian ini. Atas segala perhatian, semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam menambah wawasan dan pengetahuan.

Indralaya, April 2021

Vinny Oxtafianica

NIM. 07011281621186

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
ABSTRACT v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Konsep Administrasi Keuangan Negara 9
B. Teori Keagenan (*Principal Agent Theory*) 10
C. Pengawasan Keuangan Negara 12
E. Laporan Keuangan Sektor Publik 15
F. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 18
G. Audit Sektor Publik 21
H. Opini Audit 21
I. *Key Succes Factor* 24
J. Penelitian Terdahulu 25
K. Kerangka Pemikiran 27
BAB III METODE PENELITIAN 28
A. Desain Penelitian 28
B. Definisi Konsep 29
C. Fokus Penelitian 29
D. Jenis dan Sumber Data 30
E. Informan Penelitian 31

F. Teknik Pengumpulan Data 32
G. Teknik Analisis Data 34
H. Keabsahan Data Penelitian 35
I. Jadwal Penelitian 37
J. Sistematika Penulisan 38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 40
A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian 40
1. Sejarah Singkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih 40
2. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih 43
3. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih 45
4. Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih 46
5. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih 47
B. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 7 Tahun Berturut-Turut (2013-2019) Kota Prabumulih oleh BPK RI 55
C. Analisis Dampak yang Dirasakan oleh Pemerintah Kota Prabumulih Setelah Mendapatkan Opini WTP Selama 7 Tahun Berturut-Turut (2013-2019) 72
D. Hasil Temuan 77
BAB V PENUTUP 80
A. Kesimpulan 80
B. Saran 80
DAFTAR PUSTAKA 81
LAMPIRAN 84

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Opini BPK atas LKPD tahun 2010-2019 Wilayah Sumsel 5
2. Penelitian Terdahulu.....25
3. Fokus Penelitian 31
4. Jadwal Penelitian.....38
5. Opini BPK atas LKPD Kota Prabumulih tahun 2010-2019.....72
6. Hasil Temuan.....79

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Kerangka Pemikiran 27
2. Peta Wilayah Kota Prabumulih 42
3. Lokasi Gedung Pemerintah Kota Prabumulih 44
4. Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih 44
5. Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih 47
6. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih 61
7. *Preview* Menu Laporan Realisasi ANggaran di Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih 62
8. Tampilan Depan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Prabumulih Tahun 2019 sebelum diaudit oleh BPK RI 70
9. Piagam Penghargaan Opini Audit Terbaik Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI Kepada Pemerintah Kota Prabumulih selama 7 Tahun Berturut-Turut 77
10. Plakat Penghargaan Opini Audit Terbaik Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 Tahun Berturut-Turut (Tahun 2013 s.d. 2017) oleh BPK RI Kepada Pemerintah Kota Prabumulih 77

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 85

Lampiran 2 Surat Tugas Seminar Usulan Skripsi 87

Lampiran 3 Kartu Bimbingan Pembimbing I 88

Lampiran 4 Kartu Bimbingan Pembimbing II 89

Lampiran 5 Lembar Revisi Seminar Proposal 90

Lampiran 6 Surat Izin Penelitian 93

Lampiran 7 Surat Balasan Izin Penelitian 94

Lampiran 8 Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi 95

Lampiran 9 Kartu Bimbingan Skripsi 96

Lampiran 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 97

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Agen	: Kelompok yang bertanggung jawab mengelola sumber daya untuk kepentingan pihak prinsipal
Akuntabilitas	: Konsep etika ataupun pertanggungjawaban dari pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi publik seperti lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Audit	: Pemeriksaan
BMD	: Barang Milik Daerah
BPKAD	: Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
BPK RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
DID	: Dana Insentif Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Good governance	: Tata kelola pemerintahan yang baik dan sehat
KSF	: *Key Succes Factor*
KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
LAK	: Laporan Arus Kas
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LPPD	: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
Neraca	: Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu
Otonomi Daerah	: Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Opini Audit	: Pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
Opini WTP	: Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Opini WDP	: Opini Wajar Dengan Pengecualian
Opini TW	: Opini Tidak Wajar
Opini TMP	: Opini Tidak Memberikan Pendapat
PABU	: Prinsip Akuntansi Berterima Umum
PDTT	: Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Perjan	: Perusahaan Jawatan
Perum	: Perusahaan Umum
Prinsipal	: Kelompok yang memiliki sumber daya
PSAP	: Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
RENJA	: Rencana Kerja
RENSTRA	: Rencana Strategis
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SIMDA Keuangan	: Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan
SIPD	: Sistem Informasi Pembangunan Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPD	: Surat Penyediaan Dana
SP2D	: Surat Perintah Pembayaran Dana
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SPJ	: Surat Pertanggung Jawaban
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SPP	: Surat Permintaan Pembayaran
Value for money	: Suatu konsep penilaian kinerja organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi yang dilakukan di Indonesia pada tahun 1998 menjadikan Indonesia sebagai sistem pemerintahan yang menganut asas otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah salah satu landasan hukum bagi perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa dalam proses pembangunan daerah kabupaten dan kota harus memperhatikan prinsip demokrasi, peran sosial, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman Daerah (Mardiasmo, 2002). Sehingga, dengan adanya otonomi daerah diharapkan daerah otonom dapat mengahdirkan kebijakan-kebijakan yang dapat menyejahterakan masyarakatnya sendiri.

Otonomi daerah menginginkan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia akan mengalami beberapa perubahan. Salah satunya yakni dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Seperti kita ketahui bahwa keuangan daerah merupakan instrument yang utama bagi penyelenggaraan pemerintahn daerah, sehingga harus dikelola secara hati-hati. Kemudian dengan adanya otonomi daerah diharapkan mampu memberdayakan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta merubah sistem pengelolaan keuangan daerah. Ini berarti bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah

diwajibkan untuk mengelola dan memperbaharui sistem keuangannya menjadi *public oriented* yang bertanggung jawab dan terbuka kepada masyarakat.

Meskipun dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh atas daerah yang dipimpinnya, ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah dapat bekerja sesukanya dan semaunya. Kinerja pemerintah daerah akan di evaluasi oleh pemerintah pusat secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Untuk itu, sebagai alat penilaian dan pertimbangan pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu untuk menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Masdiantini dan Erawati, 2016).

Laporan keuangan merupakan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai status keuangan suatu entitas pada waktu tertentu; dan kinerja entitas dalam periode waktu tertentu. Laporan keuangan yang dimaksud tersebut kemudian disebut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tata cara dan tanggung jawab pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 yang mengatur tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan secara bertanggung jawab, transparan, efektif, efisien serta berkualitas kepada masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Pengelolaan laporan keuangan yang baik pada pemerintahan daerah akan menciptakan terwujudnya *good governance.* Setidaknya terdapat tiga hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah agar mewujudkan *good governance,* yakni transparansi, akuntabilitas publik, dan *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) (Mardiasmo, 2002).

Belakangan ini, tuntutan akuntabilitas publik mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam pengelolaan keuangan di berbagai lembaga dalam lingkup pemerintahan daerah. Hal ini berhubungan dengan perlunya dilakukan transparansi atau keterbukaan dalam memberikan informasi kepada publik guna memenuhi hak-hak publik. Akuntabilitas publik sendiri dapat didefiniskan sebagai tugas para wali pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyatakan, melaporkan dan mengungkapkan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (publik) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Untuk memenuhi persyaratan tersebut, pemerintahan pusat secara berkala mengevaluasi pengelolaan pemerintah daerah melalui instansi negara yang berwenang di tingkat nasional.

Instansi yang berwenang untuk mengaudit laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Tugas BPK adalah mengkaji pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dipegang oleh pemerintah sesuai dengan Pasal 23E Ayat 1 UUD 1945. Untuk lebih lanjut, hal ini kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang disiapkan oleh pemerintah daerah harus disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian setelah BPK menerima LKPD dan sebelum menyerahkan LKPD kepada DPRD, BPK diberi waktu 2 (dua) bulan untuk meninjau LKPD tersebut (Mursyidi, 2009).

Hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK akan menghasilkan opini audit, yaitu pernyataan profesional auditor atas kewajaran informasi keuangan yang diberikan.

Kemudian hasil setiap pemeriksaan BPK dirangkum dan disajikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Opini audit BPK atas LKPD ini dinilai sebagai hasil penilaian atas kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah yang menunjukkan baik atau buruk. Sehingga, pemerintah daerah akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan opini yang terbaik atas laporan keuangan yang dihasilkan. Selanjutnya, pada paragraph penjelasan Pasal 16 Ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2004, disebutkan bahwa BPK mengemukakan 4 (empat) pendapat, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Pernyataan Menolak Memberikan Opini.

Opini WTP merupakan opini audit tertinggi, artinya laporan keuangan disusun secara wajar dan berkualitas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, mengungkapkan bahwa pemberian opini BPK RI, khususnya opini WTP sangat berguna untuk menggambarkan apakah pengelolaan keuangan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, kepercayaan masyarakat termasuk investor kepada pemerintah daerah akan meningkat sehingga dapat mempercepat pembangunan terutama di daerah prioritas daerah, dan menjadi pendorong bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pengelolaan anggaran dan kesejahteraan masyarakat (www.antaranews.com, 2017).

Sepanjang tahun 2016 hingga 2019, seluruh provinsi di Indonesia telah mengalami peningkatan opini atas LKPD. Salah satunya yakni di provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerima penghargaan opini WTP atas LPKD tahun 2019. Penghargaan ini telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berturut-turut untuk yang keenam kalinya atas LKPD dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Hasil opini WTP yang diperoleh di 17 daerah dan 4 kota yang ada juga mendukung hal

tersebut.. Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD berikut:

Tabel 1.
Opini BPK atas LKPD tahun 2010-2018 Wilayah Sumsel

No	Nama Pemda	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Prov. Sumsel	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. OKU	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. OKI	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kab. Muara Enim	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Lahat	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kab. Musi Rawas	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Musi Banyuasin	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kab. Banyuasin	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kab. OKU Timur	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kab. OKU Selatan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Kab. Ogan Ilir	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kab. Empat Lawang	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kab. PALI	-	-	-	-	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Muratara	-	-	-	-	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
15	Kota Palembang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Kota Lubuk Linggau	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Kota Pagar Alam	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Kota Prabumulih	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPK.go.id

Berdasarkan tabel 1 diatas, terlihat bahwa dalam 9 tahun terakhir (2010-2019), status opini audit yang diberikan BPK kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah opini WTP yang diperoleh dari BPK meningkat tajam. Selama tahun ini, terdapat 8 daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh WTP dari WTP yang sebelumnya mendapatkan WDP, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Oku Selatan, Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Pagar Alam. Peningkatan drastis tersebut juga membuat Sumsel memperoleh opini WTP dari BPK Republik Indonesia.

Dalam tabel tersebut terlihat pula beberapa daerah yang konsisten dalam perolehan opini audit WTP tersebut, seperti Kota Palembang yang sejak tahun 2010 sudah memperoleh

WTP, disusul Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Lubuk Linggau yang sudah memperoleh WTP sejak tahun 2011, diikuti Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2012 dan Kota Prabumulih pada tahun 2013. Untuk mengetahui bagaimana sebuah LKPD kabupaten/kota yang ada dapat memperoleh WTP secara berturut-turut, maka dalam penelitian ini Kota Prabumulih akan dijadikan sebagai subjek penelitiannya.

Kota Prabumulih merupakan sebuah kota administratif di Provinsi Sumatera Selatan yang berdiri pada tanggal 21 Juni 2001 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa kota ini pertama kali mendapatkan status WTP pada tahun 2013. Sejak saat itu, Kota Prabumulih telah 6 kali berturut-turut menerima hasil opini WTP dari BPK RI hingga tahun 2020. Selain itu, beberapa tahun belakangan yakni pada tahun 2018, 2019 dan 2020, Kota Prabumulih menjadi daerah nomor dua di Indonesia yang paling cepat menyerahkan laporan keuangan kepada BPK RI. Tentunya, penyerahan LKPD yang cepat itu juga sedikit banyak berpengaruh terhadap perolehan WTP yang diberikan oleh BPK RI.

LKPD yang beropini WTP secara umum memberikan arti bahwa semua informasi yang disajikan dalam LKPD Kota Prabumulih adalah wajar dan tidak ada yang dikecualikan. Capaian opini WTP atas LKPD ini sekaligus mencerminkan kerja keras dari seluruh pengelola keuangan daerah Kota Prabumulih selama kurun waktu enam tahun. Walikota Prabumulih Ir. Ridho Yahya, M.M. mengungkapkan bahwa perolehan opini WTP ke 7 kalinya ini tak terlepas berkat kerja keras seluruh jajaran Pemkot Prabumulih dalam menyusun laporan keuangan yang baik (www.reportasekhusus.com, 2020). Ridho menjelaskan bahwa opini WTP yang diraih membuktikan pengelolaan anggaran Pemkot

Prabumulih sangat baik dan sangat transparan. Sementara, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Prabumulih, Drs. H. Jauhar Pahri Ak. CA menambahkan bahwa inilah hasil kerja sama semua pihak berupa pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkot dan dukungan dari SKPD.

Ir. Ridho Yahya, M.M. telah menjabat sebagai Walikota Prabumulih selama dua periode sejak tahun 2013 hingga tahun 2023 mendatang. Di awal masa kepemimpinannya, ia melakukan rotasi pegawai besar-besaran dan mengganti orang-orang berdasarkan kemampuannya. Hal ini dilakukan karena ia menganggap bahwa adanya sejumlah pejabat yang sudah tidak kompeten dalam bidangnya (www.detiksumsel.com, 2018). Sehingga, hal tersebut juga berperan besar dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Prabumulih secara konsisten semenjak masa kepemimpinan Pak Ridho Yahya dimulai dan berhasil membuat Kota Prabumulih memperoleh opini WTP dari BPK RI selama 7 tahun berturut-turut. Sehingga, hal ini menjadi menarik untuk diteliti.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih jauh hal tersebut dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 7 Tahun Berturut-Turut (2013-2019) Kota Prabumulih oleh BPK RI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 7 tahun berturut-turut (2013-2019) Kota Prabumulih oleh BPK RI?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 7 tahun berturut-turut (2013-2019) Kota Prabumulih oleh BPK RI.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi Jurusan Ilmu Administrasi Publik khususnya dalam Konsentrasi Keuangan Negara, dan dapat memberikan referensi untuk penelitian lebih lanjut yang berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK RI.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan kepada Pemerintah Kota Prabumulih agar dapat memaksimalkan pengelolaan APBD yang kemudian dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil penelitian ini dapat menguraikan secara rinci mengenai bentuk hubungan dan dampak yang dapat dirasakan dari pemberian hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 7 tahun berturut-turut (2013-2019) oleh BPK terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Prabumulih, serta terdapat solusi yang diberikan untuk meminimalisir masalah-masalah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Rusdi, Robyn Pilcher, dan Brian Perrin. 2012. *Performance Meassurement in Indonesia: The Case of Local Government*. Pacific Accounting Review, Vol. 24 No. 3, pp. 262-291.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Revormasi.* Jakarta: Sekertariat Jendral Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

Bastian, Indra. 2014. *Audit Sektor Publik (Edisi 3*). Jakarta: Salemba Empat.

Bohari. 1992. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Gilardi, Fabrizio. 2001. *Principal-agent models go to Europe: Independent Regulatory Agencies As Ultimate Step of Delegation.* In ECPR General Conference, Canterbury (UK), 6-8 September 2001.

Halim, Abdul dan Abdullah, Syukriy. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi.* Jurnal Akuntansi Pemerintahan Volume 2, Nomor 1, Hal: 53-64.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Revisi).* Jakarta: Salemba Empat.

Handayaningrat, Soewarno. 1981. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Hajimasagung.

Lane, Jan-Erik. 2003. *Relevance of The Principal-Agent Framework to Public Policy and Implementation*. University of Geneva and National University of Singapore. Working Paper.

Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mahsun, Mohamad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Edisi Ketiga).* Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Penerbit Andi.

Masdiantini, P. R. dan Ni Made Adi Erawati. 2016. *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovermental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 14: 1150-1182.

Masdupi, Erni. 2005. *Analisis Dampak Struktur Kepemilikan Pada Kebijakan Hutang dalam Mengontrol Konflik Keagenan.* Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 20, No. 1, Januari, Hlm 57-69.

Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.* Bandung: PT. Refika Aditama.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan (Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/K/I-XIII.2/6/2008.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sulaiman, Alfin. 2011. *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni.

Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Baru.

Suparmoko. 2004. *Keuangan Negara (dalam teori dan praktek).* Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.

Ulum, Ihyaul. 2009. *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Widjaja, Gunawan. 2002. *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

http://www.bpk.go.id/page/sejarah